

BAB 5

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menyajikan kesimpulan dari keseluruhan proses penelitian dan pembahasan sebelumnya. Pada bab ini akan merangkum temuan-temuan utama terkait strategi komunikasi diplomasi persuasif yang diterapkan oleh diplomat Indonesia dalam menangani kasus PMI di luar negeri. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang relevan untuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap PMI dan memperbaiki pendekatan diplomasi di masa mendatang. Bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara akademis maupun praktis, dalam pengembangan strategi komunikasi dalam konteks diplomasi internasional.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi diplomasi persuasif yang dilakukan oleh diplomat Indonesia dalam menangani kasus PMI merupakan kombinasi antara pendekatan hukum, pendekatan humanis, dan pendekatan kerja sama bilateral maupun multilateral. Para diplomat secara aktif membangun narasi yang memperlihatkan komitmen negara dalam melindungi warganya serta menggunakan berbagai bentuk persuasi diplomatik yang tidak bersifat konfrontatif. Narasi yang dibangun dalam proses diplomasi juga berfungsi untuk membentuk opini publik internasional dan membangun persepsi positif terhadap upaya pemerintah Indonesia.

Berdasarkan lima studi kasus utama seperti tidak menerima gaji, kekerasan fisik dan verbal, korban TPPO, ancaman hukuman mati, dan kasus ABK di Penang, ini dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi diplomasi persuasif para diplomat Indonesia melibatkan berbagai macam aspek seperti:

1. Respons cepat dan tepat sasaran, melalui tindakan langsung baik dalam bentuk komunikasi resmi (surat diplomatik, pemanggilan agen) maupun informal (pendekatan personal dan empatik);
2. Pendekatan naratif dan humanis, yaitu membingkai kasus dalam bentuk cerita korban yang menyentuh sisi moral dan kemanusiaan, guna mendapatkan dukungan dari mitra negara;
3. Pemanfaatan jaringan dan reputasi, termasuk penggunaan media sosial sebagai alat tekanan publik, serta memaksimalkan relasi kelembagaan lintas negara;
4. Adaptasi budaya dan sensitivitas kontekstual, seperti dalam konteks negara Arab, diplomasi dilakukan dengan menghormati nilai-nilai relasional, loyalitas, dan kehormatan pribadi.

Setiap kasus menunjukkan pendekatan yang berbeda dan telah mengalami penyesuaian. Penggunaan komunikasi persuasif berbasis data dan prosedur efektif dalam kasus AS. Sebaliknya, pendekatan empatik dan interpersonal sangat diperlukan pada kasus Nurhasanah dan ABK. Dalam kasus Sri Mulyani dan PMI di Malaysia, komunikasi bahkan melibatkan opini publik dan pertimbangan psikososial, menandakan perluasan makna diplomasi sebagai kerja sosial yang komunikatif.

Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi diplomasi persuasif bukan hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi merupakan proses negosiasi kompleks yang membutuhkan sensitivitas budaya, kecerdasan emosional, dan kemampuan adaptif dalam menyusun strategi komunikasi sesuai dinamika kasus. Peran diplomat sebagai komunikator strategis sekaligus negosiator kultural menjadi krusial dalam menjembatani perbedaan hukum, nilai, dan persepsi antara Indonesia dan negara tujuan.

Dengan demikian, strategi komunikasi diplomasi persuasif terbukti sebagai pendekatan efektif dan adaptif dalam melindungi hak-hak PMI di luar negeri. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi dan diplomasi, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi peningkatan kapasitas diplomatik dalam menangani isu-isu kemanusiaan lintas negara.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh diplomat sehingga wawancara yang dilakukan terbatas waktu.
- Keterbatasan ruang untuk melakukan wawancara. Sehingga dalam prosesnya terdapat intrupsi dari non-informan dan mengganggu proses berjalannya wawancara.
- Keterbatasan jumlah narasumber yang menjadikannya hanya terbatas pada lima kasus utama, sehingga belum mencakup keragaman wilayah diplomatik lainnya.

- Penggunaan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh kasus diplomasi yang dilakukan oleh diplomat Indonesia.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis mengenai pengalaman para diplomat dalam melakukan strategi komunikasi diplomasi persuasifnya guna membantu penyelesaian kasus PMI di luar negeri, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk bahan evaluasi:

1. Bagi Pemerintah Indonesia

Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan perwakilan RI di luar negeri, disarankan untuk dapat lebih melakukan penguatan dalam hal pelatihan komunikasi diplomatik bagi para diplomat, dengan fokus pada pendekatan persuasif, sensitivitas budaya, dan teknik naratif dalam situasi krisis. Selain itu, pengembangan protokol komunikasi publik yang adaptif dan empatik juga perlu diprioritaskan dalam penanganan kasus PMI yang bersifat darurat atau sensitif secara sosial.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan studi lanjutan khususnya di bidang hubungan internasional, komunikasi, dan diplomasi, diharapkan mulai mengintegrasikan materi komunikasi persuasif dan naratif ke dalam kurikulum. Kajian lintas disiplin antara diplomasi, komunikasi, dan studi migrasi perlu dikembangkan untuk

menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan diplomasi perlindungan warga negara.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Adanya keterbatasan jumlah diplomat yang diwawancarai, dianjurkan untuk memperluas cakupan wilayah studi (misalnya Amerika Latin, Asia Timur dan Eropa), serta menggali strategi diplomasi berbasis budaya lokal dalam komunikasi lintas budaya. Peneliti di masa mendatang dapat memperluas fokus studi ini dengan mengkaji lebih banyak variasi kasus PMI, termasuk sektor domestik dan non-domestik, serta perbandingan strategi komunikasi antar negara pengirim tenaga kerja. Hal ini ditujukan untuk melihat lebih jauh lagi kompleksitas penanganan kasus berdasarkan jenis dan wilayahnya.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat perlu diedukasi bahwa perlindungan terhadap PMI bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial dan pemahaman publik. Pemberitaan media dan sikap masyarakat terhadap PMI sebaiknya dibangun berdasarkan empati, penghargaan, dan dorongan untuk memperkuat sistem perlindungan, bukan sekadar menyalahkan korban.

5. Bagi Calon PMI dan PMI di Luar Negeri

Penting untuk meningkatkan literasi hukum dan pemahaman akan mekanisme perlindungan di luar negeri. Calon PMI dan PMI aktif diharapkan untuk memahami pentingnya jalur penempatan yang legal dan

berkomunikasi aktif dengan perwakilan RI jika mengalami kesulitan. Kemudian diharapkan juga dapat lebih memahami hak-haknya. Kesadaran akan pentingnya dokumentasi kerja dan pelaporan yang tepat waktu akan sangat membantu dalam perlindungan hukum dan diplomasi.